



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

EVALUASI KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 PALEMBANG

Oleh :

Aisyah *¹, M. Abduh²

Email : abduh@unitaspalembang.ac.id

ABSTRACT

Education is an important pillar in developing individual potential and quality, as well as being the foundation for the progress of society and a nation. In the implementation of education, there are a number of components that are interrelated and form a complex system. These components include educational objectives, curriculum, learning material content, learning methods and strategies, teaching staff, students, facilities and infrastructure, learning tools, and learning environment. All of these components work synergistically to form an educational ecosystem that functions as a means to develop knowledge, internalize values, hone skills, shape character and form positive attitudes. The aim is to prepare individuals to be able to adapt amidst the demands of modern progress and become competitive members of a global society.

In facing an era of rapid and complex change, education is required to always be adaptive. With the rapid development of technology, changing social dynamics, and increasingly complex global challenges, education must be able to prepare the young generation not only with knowledge, but also with critical thinking skills, creativity, collaboration, and adaptability. The curriculum is one of the most fundamental components of education in the implementation of national education.

The implementation of the Independent Curriculum was carried out as an effort to overcome the learning crisis that has been going on for a long time and was exacerbated during the Covid-19 pandemic. Apart from that, various global and national test results on education in Indonesia show unsatisfactory results, such as the PISA test results showing that students' high-level reasoning in Indonesia is still low, even for basic reasoning such as literacy and numeracy. On a national scale, the results of the Indonesian Student Competency Assessment (AKSI) and data from various surveys also show that basic competencies are still low and there is high inequality, and indicate that learning outcomes have not improved in the last 15-20 years. The results of the K13 evaluation are also taken into consideration by the government in determining policies for implementing the independent curriculum (Presenter, 2022).

The Merdeka Curriculum offers a new paradigm in Indonesian education amidst the demands of 21st century education. The development of individual potential does not only focus on aspects of knowledge but is directed at bridging character development and soft skills development. The development of an independent curriculum seeks to be accommodative in meeting various world needs.

Keywords: Evaluation, Competency, Independent Curriculum



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar penting dalam mengembangkan potensi dan kualitas individu, sekaligus menjadi fondasi bagi kemajuan masyarakat dan suatu bangsa. Dalam pelaksanaan pendidikan, terdapat sejumlah komponen yang saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang kompleks. Komponen-komponen ini meliputi tujuan pendidikan, kurikulum, konten materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas sarana dan prasarana, alat pembelajaran, serta lingkungan belajar. Seluruh komponen ini bekerja secara sinergis dalam membentuk ekosistem pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menginternalisasi nilai-nilai, mengasah keterampilan, membentuk karakter, dan membentuk sikap positif. Tujuannya adalah mempersiapkan individu agar mampu beradaptasi di tengah tuntutan kemajuan zaman serta menjadi anggota masyarakat global yang berdaya saing.

Di Indonesia pendidikan memainkan peran sentral dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke 4 UUD 1945 “Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pentingnya peran Pendidikan Nasional dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui Pendidikan, generasi penerus dipersiapkan agar dapat



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

menjadi individu yang berkualitas serta berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap Pembangunan bangsa.

Dalam menghadapi era perubahan yang cepat dan kompleks, Pendidikan dituntut untuk selalu adaptif. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, perubahan dinamika sosial, dan tantangan global yang semakin kompleks, pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi muda tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan adaptabilitas. Kurikulum merupakan salah satu komponen Pendidikan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan Pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh aspek kurikulum Rusman (2018, hlm.1). Kualitas dan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kurikulum karena kurikulum merupakan guidance penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan. Zais (1976, hlm 8) menyebutkan “curriculum as a blueprint for education, consist ultimately of experiences that it planned for learner to have”. Yang dapat diartikan kurikulum sebagai cetak biru pendidikan, memuat berbagai pengalaman yang direncanakan untuk dikuasai peserta didik. Pengembangan kurikulum bersifat dinamis karena kurikulum tidak mungkin berlaku selamanya sebab ada keterbatasan dalam konteks waktu dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah Hasan (2008, hlm. 41). perubahan kebijakan kurikulum merupakan langkah penting untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang berkembang.

Dalam Sejarah penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia, tercatat telah terjadi 11 kali perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah pada masa sebelum dan setelah era otonomi daerah (Herry, 2014, hlm. 54). Pada tahun 2021 pemerintah kembali melakukan perubahan kurikulum dengan mengeluarkan kebijakan terkait tiga opsi penggunaan kurikulum bagi satuan



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

pendidikan yakni Kurikulum K13, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Langkah ini dilakukan sebagai adaptasi terhadap kondisi pandemic Covid-19. Kurikulum merdeka awalnya merupakan kurikulum prototipe yang diberlakukan pada 2500 sekolah penggerak dan 901 sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan (SMK PK). Selanjutnya implementasi kurikulum merdeka diperluas implementasinya melalui Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri bagi sekolah yang tidak terdaftar sebagai sekolah penggerak.

Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan sebagai upaya dalam mengatasi krisis pembelajaran yang telah lama berlangsung dan diperparah pada saat pandemi Covid-19. Selain itu berbagai hasil tes baik global maupun nasional terhadap pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak memuaskan seperti hasil tes PISA menunjukkan penalaran tingkat tinggi pelajar di Indonesia masih rendah, bahkan untuk penalaran dasar seperti literasi dan numerasi. Dalam skala nasional hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) dan data berbagai survei juga menunjukkan masih rendahnya kompetensi dasar dan terjadi ketimpangan yang tinggi, serta mengindikasikan hasil belajar tidak mengalami peningkatan dalam jangka waktu 15-20 tahun terakhir. Hasil evaluasi K13 juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan implementasi kurikulum merdeka (Penyusun, 2022).

Kurikulum Merdeka menawarkan paradigma baru dalam Pendidikan Indonesia di tengah tuntutan pendidikan abad 21. Pengembangan potensi individu tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan semata melainkan diarahkan untuk menjembatani pengembangan karakter dan pengembangan soft skills. Pengembangan kurikulum merdeka berupaya akomodatif dalam memenuhi berbagai kebutuhan dunia. Tuntutan keterampilan abad ke 21, yang mencakup keterampilan untuk berpikir kritis, kreativitas, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

pemecahan masalah dan yang tak kalah pentingnya yakni literasi digital menjadi muatan yang penting dalam pembekalan peserta didik pada kurikulum merdeka. Perubahan paradigma pada kurikulum merdeka menasar pada penguatan kemerdekaan guru selaku implementator proses pembelajaran, dengan mengurangi beban-beban standar yang terlalu mengikat pembelajaran dan tuntutan proses pembelajaran yang homogen pada setiap jenjang pendidikan (Penyusun, 2022). Untuk mendukung perubahan tersebut maka kurikulum baru memiliki karakteristik fleksibel, berbasis kompetensi dan fokus pada pengembangan karakter dan softs skills.

Pengembangan kurikulum merdeka didasarkan pada pandangan filosofi merdeka belajar yang dilahirkan oleh bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, dalam pandangannya kemerdekaan adalah sebagai tujuan pendidikan dan untuk mencapainya melalui pengembangan budi pekerti. Atas dasar itu perancangan kurikulum merdeka memegang prinsip sederhana yakni mudah dipahami dan diimplementasikan, kemudian berbasis kompetensi dan fokus pada karakter, bersifat fleksibel, selaras, bergotong royong dan memperhatikan hasil kajian dan refleksi.

Perubahan kurikulum merdeka pada dasarnya adalah proses penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, beberapa aspek dari praktik kurikulum yang telah ada sebelumnya tetap dilanjutkan dan diperkuat dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Praktik pengembangan kompetensi dan pendidikan karakter sudah dilakukan pada kurikulum sebelumnya praktik ini dinilai baik dan tetap dilanjutkan dalam kurikulum merdeka dengan memberikan penguatan pada pengintegrasian model pembelajaran berbasis proyek ke dalam struktur kurikulum dengan begitu pengembangan kompetensi dan karakter menjadi bagian dari proses pembelajaran yang wajib dilakukan pada seluruh peserta didik. Selanjutnya pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang merupakan kebijakan kurikulum sebelumnya juga dikuatkan pada kurikulum



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

merdeka, pengembangan kurikulum satuan pendidikan penting dalam mengembangkan kurikulum yang bersifat kongkret dan operasional, pengembangan kurikulum operasional dapat mengakomodir keberagaman potensi dan budaya yang ada pada setiap satuan pendidikan.

Selain melakukan penyempurnaan juga terdapat inovasi-inovasi yang ditawarkan yang sekaligus menjadi karakteristik dari kurikulum merdeka diantaranya penerapan fase dalam pembelajaran yakni rentang waktu yang dialokasikan untuk menguasai kompetensi yang akan dicapai. Melalui penetapan fase sebuah kompetensi tidak harus dicapai dalam satu tahun tetapi dapat dicapai dalam rentang waktu yang lebih panjang sehingga pemberian materi pelajaran tidak terlalu padat agar peserta didik memiliki waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensinya. Penetapan fase pada kurikulum merdeka diselaraskan dengan fase perkembangan anak dan remaja. Selanjutnya perubahan lain pada kurikulum merdeka yakni perumusan capaian pembelajaran jika sebelumnya penulisan kompetensi yang akan dicapai dikenal dengan istilah KI dan KD yang ditulis dalam kalimat tunggal yang disusun dalam poin-poin namun pada kurikulum merdeka penulisan kompetensi dituangkan dalam capaian pembelajaran ditulis dalam sebuah rangkaian yang memuat pemahaman, sikap dan pengembangan karakter serta keterampilan. Perbedaan selanjutnya adalah dalam mengalokasikan waktu pembelajaran jika pada kurikulum sebelumnya penetapan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam per minggu, pada kurikulum merdeka alokasi jam pelajaran ditetapkan dalam pertahun dengan mengalokasikan waktu untuk pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler.

Proses pembelajaran di kelas merupakan tempat untuk mengimplementasikan dan menguji kurikulum. Ali & Susilana(2021, hlm.197) berpendapat bahwa “pembelajaran merupakan proses utama dalam implementasi kurikulum”. aktivitas pembelajaran sebagai upaya aktif untuk



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

memfasilitasi peserta didik belajar secara terarah dan sistematis agar peserta didik dapat mencapai tujuan secara efektif. Oliva & Gordon (2013, hlm. 7) menjelaskan bahwa “curriculum can be conceived as the “what” or ends, and instruction as the “how” or means” yang mempunyai arti bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang akan diajarkan sedangkan pembelajaran berkaitan dengan cara mengajarkannya. Untuk mewujudkan kurikulum yang nyata maka kurikulum harus dilaksanakan pada proses pembelajaran. Dalam pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat dan kemampuan pengajar diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Proses implementasi kurikulum bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih lagi jika berkaitan dengan implementasi dari sebuah inovasi kurikulum, perlu adaptasi khususnya bagi guru sebagai aktor dalam implementasi kurikulum. Menurut Nachuah & Ph, (2019) “curriculum implementation depends on the quality of teachers, and overall instructional support for teachers” Yang dapat dimaknai bahwa implementasi kurikulum sangat tergantung pada kualitas guru dan secara keseluruhan dukungan pembelajaran bagi guru.

Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari reformasi pendidikan dengan paradigma barunya diharapkan dapat membawa perubahan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Satuan pendidikan sebagai implementator perubahan diharapkan dapat mengimplementasi kurikulum merdeka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh perubahan kurikulum. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Meskipun demikian, secara filosofis pemerintah menganjurkan praktik implementasi kurikulum Merdeka sesuai pada prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen sesuai tahap capaian peserta didik. Pada implementasi kurikulum merdeka setiap jenis dan jenjang pendidikan diarahkan untuk melakukan pengembangan kurikulum dengan berpegang pada prinsip



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

diversifikasi dan menyesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, memperhatikan potensi daerah dan memperhatikan perkembangan peserta didik. Selain itu, pembelajaran pada kurikulum merdeka juga dilaksanakan secara berdiferensiasi (Aprima, 2022). Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran pada kurikulum merdeka yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan, bakat dan minat siswa. Ada tiga aspek yang dapat dibedakan dalam pelaksanaan pembelajaran menurut Kristiani dkk (2021) yaitu aspek konten yang mau diajarkan, aspek proses atau kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik di kelas, dan aspek ketiga adalah asesmen berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

Meskipun perubahan kurikulum dianggap sebagai langkah positif untuk penyempurnaan dan perbaikan pendidikan, namun implementasinya tidak selalu berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam implementasi kurikulum merdeka seperti diungkapkan dalam penelitian Kristiani dkk.(2021) Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh guru pada implementasi kurikulum Merdeka yakni pada aspek penyusunan perangkat pembelajaran adalah menjabarkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran dan menyusunnya dalam alur tujuan pembelajaran, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah terkait identifikasi kebutuhan siswa hingga variasi media dan metode pembelajaran yang tepat bagi setiap kelompok siswa. Sedangkan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan asesmen yakni ketepatan dalam menganalisis hasil asesmen diagnostik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Zulaiha dkk. (2022) bahwa problem yang dihadapi oleh guru dalam implementasi kurikulum mencakup beberapa aspek, seperti kesulitan dalam merumuskan perangkat pembelajaran hingga ke modul ajar, selanjutnya kendala dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai, dan



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

ketiga kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, termasuk kesulitan dalam menentukan pembelajaran proyek.

Selain itu, perubahan paradigma belajar dalam kurikulum Merdeka memerlukan penyesuaian dalam pola pikir siswa, guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Lamie, (dalam Yan, 2015) menjelaskan bahwa perubahan merupakan proses budaya yang kompleks, tidak pasti, dan tidak dapat diprediksi. Niat dari pembuat kebijakan saja tidak selalu dapat menyebabkan perubahan secara langsung, perubahan tidak selalu berjalan mulus karena faktor budaya lama yang masih memengaruhi di tingkat mikro. Terkadang, perubahan kurikulum tidak diiringi oleh perubahan praktik yang menggambarkan esensi dari kurikulum itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Rusman(Rusman, 2018, hlm. 18) sering kali implementasi kurikulum tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, dan ini dapat berdampak pada ketidaktercapaian tujuan atau kompetensi yang diinginkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum juga telah diidentifikasi oleh Hassan (Rusman, 2018, hlm. 70) termasuk karakteristik kurikulum itu sendiri, strategi implementasi yang diterapkan, karakteristik penilaian, pemahaman dan respons guru, serta keterampilan mengarahkan proses belajar. Dalam konteks ini, kesiapan pelaksana, khususnya guru, menjadi elemen penting dalam menjalankan kurikulum. seperti yang dijelaskan oleh Printr (dalam Sanjaya, 2008, hlm. 28) guru memainkan peran ganda sebagai Implementers, Adapter, Developer dan Researchers.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 19 Palembang menunjukkan bahwa SMP Negeri 19 Palembang merupakan salah satu sekolah yang telah melaksanakan kurikulum merdeka, sekolah ini telah melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 dengan kategori Mandiri Berubah. Namun, implementasi kurikulum merdeka di



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

sekolah ini masih dihadapkan pada berbagai kendala. Di antara permasalahan yang muncul adalah kesulitan dalam mengadaptasi dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Selain itu, terungkap bahwa belum semua guru mengikuti pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 19 Palembang dengan menggunakan model evaluasi Countenance Stake's. model evaluasi ini menekankan pada dua hal pokok yakni deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi, yaitu; Antecedent (konteks awal), Transaksi (Proses), dan Hasil (outcome). Model evaluasi ini dipilih karena bersifat komprehensif dan sesuai dengan tujuan evaluasi penelitian ini yakni untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 19 Palembang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan pertimbangan sebagai masukan untuk perbaikan implementasi kurikulum merdeka.

a. Evaluasi kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu (Hasan, 2014). evaluasi kurikulum mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kurikulum tersebut berfungsi, sejauh mana kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan utama evaluasi menurut stufflebeam (1971) memberikan informasi terhadap pembuat keputusan dan berguna untuk membuat pertimbangan berbagai alternatif keputusan. Upaya evaluasi untuk mengidentifikasi area perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan yang mungkin diperlukan



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

agar kurikulum dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam penelitian ini evaluasi kurikulum dimaknai sebagai suatu pendekatan sistematis untuk menggali informasi, menganalisis dan menyajikan data untuk menentukan nilai dan arti dari sebuah kurikulum

b. Implementasi Kurikulum

Implementasi merujuk pada penerapan konsep rencana kurikulum yang dikembangkan ke dalam praktik, Miller dan Saller (1985) menyatakan “in some cases, implementation has been identified with instruction...”. Sejalan dengan pandangan tersebut Saylor dkk mengemukakan “instruction is this the implementation of the curriculum plan, usually but not necessarily, involving teaching in the sense of student teacher interaction in an educational setting”.(dalam Rusman, 2018, hlm. 70). Dari kedua pandangan ini mengindikasikan bahwa aspek instruksional merupakan bagian penting dari pelaksanaan kurikulum, implementasi kurikulum melibatkan peran guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan rencana dan konsep kurikulum yang telah dirancang dan juga dapat mencakup berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks Pendidikan dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam penelitian ini implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai penerapan rencana dan konsep kurikulum ke dalam proses pembelajaran, mencakup interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

c. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek sebagai upaya meningkatkan kualitas Pendidikan untuk mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia. Implementasi kurikulum merdeka merujuk pada kepmendikbudristek nomor



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum. Pengembangan kurikulum Merdeka disesuaikan dengan perubahan standar nasional pendidikan yang merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum. Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses; dan standar penilaian Pendidikan.

d. Evaluasi Model Countenance Stake

Evaluasi model Countenance Stake menekankan adanya dua hal pokok yaitu deskripsi dan pertimbangan serta membedakan tiga tahapan dalam evaluasi yaitu tahap antecedent, transaction dan outcome. Pada evaluasi implementasi kurikulum Merdeka pada SMP Negeri 19 Palembang komponen tahap entecedent meliputi perencanaan pembelajaran, selanjutnya transaction meliputi kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian dan outcome meliputi hasil belajar.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

DAFTAR PUSTAKA

Hendarman, 2012 Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.

Depertemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia(2006a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Depertemen Pendidikan Nasional.

Depertemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Jakarta Departemen Pendidikan Nasional.

Mulyasa E 2002. Kurikulum Berbasis kompetensi, Konsep Karakteristik dan Implementasi”Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Purwanto, 2009 Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka belajar

Hamalik Oemar .2008 Pendidikan Guru , Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta, Bumi Aksara.

Subrata, Sumadi.1984.Psikologi Pendidikan. Jakarta : Raja Grafindo Persada Dryjen,Gordon dan Jannette Vos.1999.Revolusi Cara Belajar Jakarta: Mizan

Direktorat Sekolah Dasar. (2022). Buku Saku Serba-Serbi Kurikulum Merdeka

Kekhasan Sekolah Dasar. Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek.

Huang, Y., Wang, Y., Tai, Y., Liu, X., Shen, P., Li, S., Li, J., & Huang, F. (2020).

Curricularface: Adaptive curriculum learning loss for deep face recognition.Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer

Kebudayaan, K. P. dan. (2022). Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.



WIYATA PRAJA

e.Issn no : 2809-3771

Jurnal Ilmu Pemerintahan: Vol.6 No.1 2024

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Kemendikbud. (2017). Materi Pendukung Literasi Numerasi. In Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.